



**Pemerintah Kabupaten Jombang
Kecamatan Bareng**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat, maka perlu dilakukan perencanaan yang dapat mengakomodir dan telah disepakati oleh berbagai *stakeholder*. Hasil dari perencanaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan untuk periode tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan hasil perencanaan menjadi sistematis, terorganisir, dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 yang diawali dari identifikasi isu-isu strategis bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, baik yang terjadi di Kabupaten Jombang maupun di tingkat nasional. Dengan memperhatikan masukan dan saran dari berbagai *stakeholder*, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang menentukan isu-isu strategis bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Tentunya seluruh proses penyusunan yang telah dilakukan mengacu pada

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen perubahan Renstra ini, khususnya stakeholder yang telah terlibat. Semoga Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Jombang, 27 Juni 2023

Camat Bareng



USMAN, SE., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710117 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARENG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bareng 8

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bareng 15

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bareng 20

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 52

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BARENG

3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bareng 55

3.2 Isu Strategis 56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bareng..... 58

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Bareng 60

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bareng 68

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Bareng..... 75

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Bareng..... 86

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah. Perencanaan memberi kesempatan pula untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih. Perencanaan juga merupakan alat ukur untuk melakukan evaluasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang tertuang didalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan adalah mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bareng Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen Pengganti RPJMD dan Renstra (2018-2023) yang telah berakhir sekaligus sebagai landasan pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja PD untuk tahun 2024-2026. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan,

Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra 2024-2026 berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintergrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Bareng setiap tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bareng Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan program yang mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bareng Tahun 2024 - 2026 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026
21. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jombang periode tahun 2024-2026 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Kecamatan Bareng;
4. Mendukung seluruh jajaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 3 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bareng ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARENG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bareng
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bareng
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bareng
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BARENG

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bareng
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bareng
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Bareng

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bareng

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BARENG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Bareng dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi produk hukum desa;
- j. Melaksanakan pembinaan tata kelola keuangan desa dan aset desa;
- k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring SID (Sistem Informasi Desa);
- l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan LPPDes dan LKPJ
- m. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, UPK, BKD, Pasar Desa; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat desa seperti PKK, LPMD, KPMD, dan Pokmas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kemiskinan melalui program – program bantuan sosial;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan PHBN dan PHBA;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

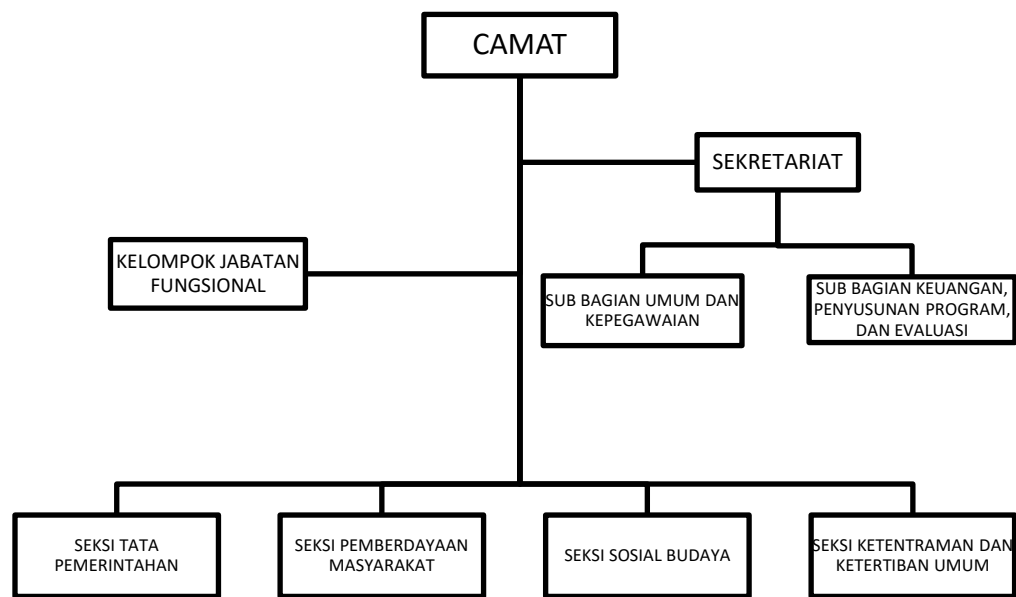
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Bareng tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang per bulan Januari 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bareng



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45Tahun 2019

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Aparatur Kecamatan sebagai unsur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah pasti akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan, masyarakat maupun organisasi pemerintah daerah diatasnya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, aparatur kecamatan dituntut mempunyai kualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/ sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi serta loyalitas.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Eselon dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	9
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
Jumlah		16

Sumber Data: SIAP ASN

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Bareng yang terbanyak golongan III, sebanyak 9 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	6
4	Pelaksana	8
Jumlah		16

Sumber Data: SIAP ASN

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	5
Diploma (D3)	1
Sarjana (S1)	8
Magister (S2)	2
Jumlah	16

Sumber Data: SIAP ASN

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kantor Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang paling banyak adalah Sarjana, yang rata-rata pada posisi Staf/Pelaksana dan memegang jabatan struktural eselon III dan IV. Peningkatan kapasitas ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan mempengaruhi kualitas pelayanan dan pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan Bareng berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim III: 1 orang Diklatpim IV: 5 orang	-	-
2	Fungsional Khusus	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-

Sumber Data: SIAP ASN

Saat ini Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang menempati gedung kantor yang berada di Jl. Dr. Soetomo No. 138 Kec. Bareng. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Inventaris Barang

No .	Nama/ Jenis Barang	Jumla h	Kondisi Barang		
			Bai k	Kuran g Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	9	9	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	2	2	-	
2	AC	9	9		
3	Peralatan Personal komputer	2	2	-	-
4	Rak Arsip	2	2	-	
5	Filling Plastik	2	2	-	
6	Rak Kayu	2	2	-	
7	White Board	1	1	-	
8	Lemari Kayu	9	9	-	
9	Zice (Meja Pelayanan)	1	1	-	
10	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	
11	Meja Rapat	3	3	-	
12	Meja Kerja	15	15	-	
13	Kursi Rapat	35	35		
14	Kursi Tamu	2	2		
15	Filling Besi	3	3	-	
16	Kursi Putar	7	7		
17	Kursi Lipat	51	51	-	
18	Lemari Es	1	1		
19	Mesin Absensi	3	2		1
20	Kipas Angin	11	8	-	
21	Kompor Gas	1			
22	Alat Permainan Edukasi	1 set	1		
23	Televisi	4	4		
24	Podium	-	-		

25	P C	5	4		1
26	Laptop	7	6		1
27	Kursi Staf	8	8		
28	Printer	14	8	4	2
29	CCTV	1	1		
30	Monitor	-	-		
31	Meja kerja pejabat eselon III	2	2		
32	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	4		
33	Kursi Rapat pejabat	6	6		
34	Camera + attachment	1	1		
35	Microphone	1	1		
36	Lemari Arsip	1	1		
37	Soundsystem	3	3		
38	Mesin Antrian	1	1		
39	Kursi Roda	1	1		
40	Alat pemadam kebakaran	2	2		

Sumber Data: Daftar Inventaris Barang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bareng Tahun 2018 s/d 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	NILAI IKM		√		82,02	83,46	83,5	84,2	85,3	60,22	82,64	83	N/A	N/A	73,42	99,01	99,40	N/A	N/A
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Bareng Minimal BAIK				61	73	N/A	N/A	N/A	60,22	62,5	N/A	N/A	N/A	98,72	85,61	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	8	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
7	Nilai SAKIP				61,61	61,83	70,01	70,05	70,10	60,03	60,05	70,61	N/A	N/A	100,97	99,12	104,17	N/A	N/A
8	Persentase pemenuhan pelayanan kelancaran administrasi perkantoran				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				20	18	N/A	N/A	N/A	20	18	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
10	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional				-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
12	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang direhab				165	-	N/A	N/A	N/A	165	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
13	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun				211		N/A	N/A	N/A	211		N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				1	65	N/A	N/A	N/A	1	65	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
15	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara				588,5	150	N/A	N/A	N/A	588,5	150	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
16	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				21	22	N/A	N/A	N/A	21	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
17	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				22	-	N/A	N/A	N/A	22	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
19	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Bareng yang tersusun				-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
21	Jumlah Dokumen Renja Kec. Bareng yang tersusun				2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
22	Jumlah dokumen Laporan LKJIP yang tersusun				1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
23	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Bareng yang tersusun				2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
24	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		√		N/A	N/A	66	73,39	N/A	N/A	N/A	60,89	N/A	N/A	N/A	N/A	92,26	N/A	N/A
25	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng				60,1	62,5	70,0 1	73	N/A	60,68	61,95	72,92	N/A	N/A	100,97	99,12	104,17	N/A	N/A
26	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,12	N/A	N/A	N/A	N/A	100,12	N/A	N/A
27	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
28	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
29	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
30	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
31	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
32	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Bareng yang difasilitasi				N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	14	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
33	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A		12	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
34	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
35	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng</i>				N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
36	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
37	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
38	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
39	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	N/A	11		N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
40	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	N/A	36	24	N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
41	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	N/A	41930	7850	N/A	N/A	N/A	41930	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
42	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
43	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	N/A	10	3	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
44	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.				N/A	N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
45	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
46	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
47	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	N/A	23	3	N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
48	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
49	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
50	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum				N/A	N/A	5	4	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
51	Jumlah penyediaan benda pos				N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
52	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
53	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
54	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.				N/A	N/A	23	23	N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
55	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
56	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/A	N/A	21	9	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
57	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√		N/A	N/A	7,74	8,00	N/A	N/A	N/A	7,93	N/A	N/A	N/A	N/A	102,45	N/A	N/A
58	IKM Kecamatan Bareng				N/A	N/A	83,5	84,2	N/A	N/A	N/A	89,83	N/A	N/A	N/A	N/A	83	N/A	N/A
59	IPP Kecamatan Bareng				N/A	N/A	3,41	3,51	N/A	N/A	N/A	3,438	N/A	N/A	N/A	N/A	3,2	N/A	N/A
60	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	76	85,1	N/A	N/A	N/A	83,12	N/A	N/A	N/A	N/A	109,36	N/A	N/A
61	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
62	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
63	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
64	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
65	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
66	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
67	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
68	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
69	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
70	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
71	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
72	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum				N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
73	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
74	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	
75	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
76	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
77	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
78	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
79	<i>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
80	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
81	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
82	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desayang tepat waktu</i>				N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
83	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
84	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
85	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	N/A	13	13	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
86	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	N/A	13	13	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
87	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		7		N/A	N/A	N/A	N/A	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng				N/A	N/A	N/A	N/A	73,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
90	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
91	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
93	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
97	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
101	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
102	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
103	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
104	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
105	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
106	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
107	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
108	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
109	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
110	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
112	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
114	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
115	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
117	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
118	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
119	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		J		N/A	N/A	N/A	N/A	8,10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	IKM Kecamatan Bareng				N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	IPP Kecamatan Bareng				N/A	N/A	N/A	N/A	3,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	85,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
123	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
124	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
125	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
126	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
127	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
128	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
129	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
130	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
131	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
132	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
133	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
134	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
135	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
136	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
137	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
138	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
139	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
140	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
141	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
142	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
143	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
144	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan administrasi perkantoran	256.898.064	201.894.300	N/A	N/A	N/A	246.750.000	191.058.071	N/A	N/A	N/A	96%	95%	N/A	N/A	N/A	-21%	-23%
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	256.898.064	201.894.300	N/A	N/A	N/A	246.750.000	191.058.071	N/A	N/A	N/A	96%	95%	N/A	N/A	N/A	-21%	-23%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	308.775.000	163.336.060	N/A	N/A	N/A	303.750.000	162.990.298	N/A	N/A	N/A	98%	100%	N/A	N/A	N/A	-47%	-46%
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan gedung kantor / bangunan pendukungnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	54.375.000	134.998.810	N/A	N/A	N/A	54.375.000	134.913.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	148%	148%
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	226.400.000	13.339.250	N/A	N/A	N/A	221.375.000	13.312.500	N/A	N/A	N/A	98%	100%	N/A	N/A	N/A	-94%	-94%
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	8.000.000	5.050.000	N/A	N/A	N/A	8.000.000	5.050.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	-37%	-37%
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	10.000.000	9.948.000	N/A	N/A	N/A	10.000.000	9.714.798	N/A	N/A	N/A	100%	98%	N/A	N/A	N/A	-1%	-3%
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	23.110.000	11.195.500	N/A	N/A	N/A	23.060.000	11.193.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	-52%	-51%
Penyusunan rencana strategis SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Penyusunan Rencana Kerja SKPD	14.050.000	6.950.500	N/A	N/A	N/A	14.000.000	6.948.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	-51%	-50%
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	2.600.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	2.600.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	-23%	-23%
Penyusunan laporan keuangan SKPD	6.460.000	2.245.000	N/A	N/A	N/A	6.460.000	2.245.000	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	-65%	-65%
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.400.000	9.450.000	N/A	N/A	N/A	14.400.000	9.400.000	N/A	N/A	N/A	100%	99%	N/A	N/A	N/A	-34%	-35%
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.570.000	39.204.200	N/A	N/A	N/A	48.000.000	38.459.500	N/A	N/A	N/A	99%	98%	N/A	N/A	N/A	-19%	-20%
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	25.000.000	23.257.500	N/A	N/A	N/A	25.000.000	22.805.000	N/A	N/A	N/A	100%	98%	N/A	N/A	N/A	-7%	-9%
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	65.090.000	51.525.000	N/A	N/A	N/A	65.237.500	49.845.000	N/A	N/A	N/A	100%	97%	N/A	N/A	N/A	-21%	-24%
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	3.248.926.374	2.559.192.838	N/A	N/A	N/A	2.414.921.028	2.428.283.742	N/A	N/A	N/A	74%	95%	N/A	-21%	0%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	6.517.000	1.963.000	N/A	N/A	N/A	5.905.000	1.925.000	N/A	N/A	N/A	91%	98%	N/A	-70%	-61%
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	4.084.400	438.500	N/A	N/A	N/A	4.021.000	438.500	N/A	N/A	N/A	98%	100%	N/A	-89%	-88%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	2.432.600	1.524.500	N/A	N/A	N/A	1.884.000	1.486.500	N/A	N/A	N/A	77%	98%	N/A	0	0
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	2.807.180.474	2.295.120.789	N/A	N/A	N/A	2.006.634.553	2.177.935.941	N/A	N/A	N/A	71%	95%	N/A	-18%	6%
Sub Kegiatan :	N/A	N/A	2.807.180.474	2.238.983.189	N/A	N/A	N/A	2.006.634.553	2.121.798.341	N/A	N/A	N/A	71%	95%	N/A	-20%	4%

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
Pelaksanaan penatrusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	55.764.000	N/A	N/A	N/A	N/A	55.764.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	0	0
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	373.600	N/A	N/A	N/A	N/A	373.600	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	5.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	5.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	90.719.000	25.265.900	N/A	N/A	N/A	77.502.000	24.668.000	N/A	N/A	N/A	85%	98%	N/A		
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	7.872.600	4.577.600	N/A	N/A	N/A	7.842.000	4.571.500	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	-42%	-42%
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.980.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	65.230.000	10.560.000	N/A	N/A	N/A	52.750.000	10560000	N/A	N/A	N/A	81%	100%	N/A	-84%	-65%
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	1.870.600	3.528.300	N/A	N/A	N/A	1.670.000	3.527.500	N/A	N/A	N/A	89%	100%	N/A	89%	99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	2.220.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.650.000	N/A	N/A	N/A	N/A	74%	N/A	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	14.896.800	N/A	N/A	N/A	N/A	14.855.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	849.000	1.380.000	N/A	N/A	N/A	385.000	1.379.000	N/A	N/A	N/A	45%	100%	N/A	63%	117%
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	211.005.900	9.920.000	N/A	N/A	N/A	208.785.600	9.800.000	N/A	N/A	N/A	99%	99%	N/A	-95%	-94%
Sub Kegiatan :	N/A	N/A	199.928.000	N/A	N/A	N/A	N/A	197.875.600	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	11.077.900	9.920.000	N/A	N/A	N/A	10.910.000	9.800.000	N/A	N/A	N/A	0,98	0,99	N/A	-10%	-10%
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	61.150.000	73.080.000	N/A	N/A	N/A	54.656.575	64.574.856	N/A	N/A	N/A	89%	88%	N/A	-39	-39
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	27.600.000	37.800.000	N/A	N/A	N/A	24.000.575	32.174.856	N/A	N/A	N/A	87%	85%	N/A	37%	30%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	33.550.000	35.280.000	N/A	N/A	N/A	30.656.000	32.400.000	N/A	N/A	N/A	99,9	100	N/A	5%	5%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	72.354.000	148.243.149	N/A	N/A	N/A	61.437.300	144.380.445	N/A	N/A	N/A	85%	97%	N/A	105%	115%
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	54.358.000	32.607.600	N/A	N/A	N/A	44.592.300	30.995.850	N/A	N/A	N/A	82%	95%	N/A	-40%	-25%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	9.996.000	106.985.549	N/A	N/A	N/A	9.945.000	104.787.095	N/A	N/A	N/A	99%	98%	N/A	970%	954%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	8.000.000	8.650.000	N/A	N/A	N/A	6.900.000	8.597.500	N/A	N/A	N/A	86%	99%	N/A	8%	25%
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	16.735.000	10.987.600	N/A	N/A	N/A	10.320.000	10.807.000	N/A	N/A	N/A	62%	98%	N/A	0%	5%
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	16.735.000	10.987.600	N/A	N/A	N/A	10.320.000	10.807.000	N/A	N/A	N/A	62%	98%	N/A	-34%	5%
Sub Kegiatan:	N/A	N/A	16.735.000	10.987.600	N/A	N/A	N/A	10.320.000	10.807.000	N/A	N/A	N/A	62%	98%	N/A	-34%	5%

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	16.634.000	1.450.000	N/A	N/A	N/A	10.097.000	1.450.000	N/A	N/A	N/A	61%	100%	N/A	-91%	-86%
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	16.634.000	1.450.000	N/A	N/A	N/A	10.097.000	1.450.000	N/A	N/A	N/A	61%	100%	N/A	-91%	-86%
Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	N/A	16.634.000	700.000	N/A	N/A	N/A	10.097.000	700.000	N/A	N/A	N/A	61%	100%	N/A	-96%	-1342%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	8.340.000	2.279.500	N/A	N/A	N/A	8.041.000	2.265.000	N/A	N/A	N/A	96%	99%	N/A	-73%	-255%
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	8.340.000	2.279.500	N/A	N/A	N/A	8.041.000	2.265.000	N/A	N/A	N/A	96%	99%	N/A	-73%	-255%
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	8.340.000	2.279.500	N/A	N/A	N/A	8.041.000	2.265.000	N/A	N/A	N/A	96%	99%	N/A	-73%	-255%
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	12.160.000	9.816.900	N/A	N/A	N/A	12.154.500	9.814.700	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	-19%	-24%
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	12.160.000	9.816.900	N/A	N/A	N/A	12.154.500	9.814.700	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	-19%	-24%
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	12.160.000	9.816.900	N/A	N/A	N/A	12.154.500	9.814.700	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	-19%	-24%

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Program:																	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	21.725.400	25.211.800	N/A	N/A	N/A	17.862.000	18.389.500	N/A	N/A	N/A	82%	73%	N/A	16%	3%
Kegiatan:																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	21.725.400	25.211.800	N/A	N/A	N/A	17.862.000	18.389.500	N/A	N/A	N/A	82%	73%	N/A	16%	3%
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	21.725.400	25.211.800	N/A	N/A	N/A	17.862.000	18.389.500	N/A	N/A	N/A	82%	73%	N/A	16%	3%
Program:																	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	2.564.526.585	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	4.288.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	3.539.850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	748.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.266.811.865	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.192.613.865	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	71.598.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	108.262.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	62.130.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	62.130.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.638.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	1.960.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	16.674.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	5.049.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	42.466.491	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	42.466.491	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	87.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	35.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	52.420.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	55.177.679	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	42.997.679	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	12.180.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	6.370.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.370.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.370.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	30.561.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	30.561.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	24.221.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	12.851.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	12.851.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	12.851.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	18.965.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	18.965.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	18.965.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	40.515.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	40.515.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	40.515.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan yang signifikan kepada instansi pemerintah daerah, salah satu yang mengalami perubahan adalah kecamatan. Kedudukan camat berubah dari sebelumnya camat berperan sebagai kepala wilayah beralih menjadi perangkat daerah. Selain kecamatan, desa juga mengalami perubahan akibat pelaksanaan otonomi daerah. Desa setelah pelaksanaan otonomi dapat memiliki otonominya sendiri dan bebas mengatur pemerintahannya sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Perubahan status dan kedudukan camat dan desa juga membawa perubahan terhadap hubungan kerja yang terjalin antara camat dengan kepala desa. Hubungan camat dengan kepala desa yang sebelumnya berupa hubungan yang bersifat hierarkis berubah menjadi hubungan kerja yang bersifat fasilitatif, koordinatif, hubungan kerjasama dan pembinaan dan pengawasan.

Desa yang merupakan kelompok sasaran layanan kecamatan, dalam hal ini kecamatan berperan sebagai fasilitator yang sesuai dengan pasal 98 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, meliputi:

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

10. Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Selain desa, kelompok penerima layanan kecamatan adalah Masyarakat, dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi;

1. Pelayanan bidang perizinan
2. Pelayanan bidang non perizinan

Pedoman pelayanan kecamatan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam pasal 4 PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, mitra Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan di wilayah Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) yang terbentuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Forkopimcam menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BARENG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang wajib menyusun dokumen perencanaan melalui proses perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bareng selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya jumlah aparatur sipil di Kecamatan Bareng yang mempengaruhi efisiensi pelayanan.	Jumlah personil ASN di Kecamatan Bareng hanya 16 pegawai
		Kompetensi personil aparatur pelayanan yang masih rendah teknis tertentu	Minimnya diklat dan pembinaan yang mengikutsertakan para personil Kecamatan
2.	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan	Sarana dan Prasarana pelayanan PATEN Kecamatan Bareng belum memenuhi

			kriteria Zona Integritas (ZI)
3.	Pelayanan	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.	Masyarakat yang semakin kritis mengharapkan pelayanan harus menerapkan prinsip <i>good governance</i>
4.	Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tupoksi kecamatan	Belum ada sistem informasi yang dapat di akses oleh seluruh Desa / masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan di Kecamatan

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Bareng dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Bareng adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes disusun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat tanggal 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Bareng karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah “Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bareng

Bahwasanya Tujuan dan sasaran Kecamatan Bareng mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.

Tujuan yang akan diwujudkan adalah ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.***

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Bareng beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bareng

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	61	62	63
		1. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	72,50	73,00	73,50
			Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	62,00	63,45	65,00
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	6,72	6,75	6,80

4.2 Cascading Kinerja

Penyusunan Renstra Perangkat harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah, dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Cascading Renstra Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Cascading Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kab. Jombang Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bareng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

										Administra si Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												2. Pelaksanaan penatausahaa n dan pengujian/veri fikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD
											2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
										Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
										Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyedian komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan

												2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
												5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
												6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

										Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
												2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi
												3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi
					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
									Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
								Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

								Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase Laporan Pertanggungj awaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungja waban APBDes dengan lengkap	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa
								Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembanguna n dan Lembaga Pemberdayaa n Masyarakat yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Jumlah Lembaga/Bada n Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan
											Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyaraka tan yang berpartisipas i dalam forum musyawarah perencanaan pembanguna n di Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Kecamatan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

1. Peluang

- a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima.
- b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan
- c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan
- d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.

2. Ancaman

- a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat

- b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan
- c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan
- d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

3. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang
- b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum
- c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan
- d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan

- a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
- e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

IFAS EFAS	<u>Kekuatan (Strengths) :</u> a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.	<u>Kelemahan (Weaknesses) :</u> a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan. b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.
	<u>Peluang (Opportunities) :</u> a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati	<u>Strategi SO</u> 1) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel 2) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima <u>Strategi WO</u> 1) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah

guna menunjang pelayanan prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.	3) Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 4) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 5) Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.	3) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan.
--	---	---

<u>Ancaman (Threats) :</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas	1) Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran. 2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintahan Kecamatan 3) Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan	1) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan.

dalam musrenbang Kecamatan c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.	5) Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat 6) Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat 7) Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat 8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.	
--	---	--

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan
4. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan
6. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat
7. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat
8. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan yaitu :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif
4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)
5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
7. Optimalisasi penyajian data dan informasi

Rumusan sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN RPD: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	- Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan - Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan - Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan - Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan - Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat - Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat	- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan - Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif - Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) - Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
	2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan instansi pemerintah	- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima. - Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat	- Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ - Optimalisasi penyajian data dan informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan

untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bareng pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bareng adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator, sasaran dan rencana pencapaian program dan kegiatan tersaji dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Bareng Kab. Jombang Tahun 2024-2026

Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 050-5889																	Matriks Renstra Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur																	
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikat or Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	Target Renstra						Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikato r Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	Target Renstra						Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
									2024		2025		2026													2024		2025		2026				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bareng	7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	100	3,253,017,625	100	3,370,045,225	100	6,253,017,625	100	6,253,017,625	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bareng	7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	100	3,253,017,625	100	3,370,045,225	100	6,253,017,625	100	6,253,017,625	
				7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100	7,829,750	100	7,829,750	100	7,829,750	100	7,829,750					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100	7,829,750	100	7,829,750	100	7,829,750	100	7,829,750	
				7.01.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	2	7,139,850	2	7,139,850	3	7,139,850	3	7,139,850					7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	2	7,139,850	2	7,139,850	3	7,139,850	3	7,139,850	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	5	689,900	5	689,900	5	689,900	5	689,900					7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	5	689,900	5	689,900	5	689,900	5	689,900	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan	%	N/A	100	2,937,689,905	100	2,937,689,905	100	2,937,689,905	100	2,937,689,905					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan	%	N/A	100	2,937,689,905	100	2,937,689,905	100	2,937,689,905	100	2,937,689,905	

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

					ASN tepat waktu														ASN tepat waktu													
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100				
				7.01.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	N/A	16	2,863,491,905	16	2,863,491,905	16	2,863,491,905	16	2,863,491,905			7.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	N/A	16	2,863,491,905	16	2,863,491,905	16	2,863,491,905	16	2,863,491,905	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.02.03	2. Pelaksanaan penatrusahan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatrusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	71,598,000	12	71,598,000	12	71,598,000	12	71,598,000			7.01.01.2.02.0003	2. Pelaksanaan Penatrusahan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatrusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	71,598,000	12	71,598,000	12	71,598,000	12	71,598,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000			7.01.01.2.02.0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000	1	2,600,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	%	N/A	100	13,300,000	100	13,300,000	100	13,300,000	100	13,300,000			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	%	N/A	100	13,300,000	100	13,300,000	100	13,300,000	100	13,300,000	
				7.01.01.2.05.02	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	N/A	38	13,300,000	38	13,300,000	38	13,300,000	38	13,300,000			7.01.01.2.05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	N/A	38	13,300,000	38	13,300,000	38	13,300,000	38	13,300,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	100	111,175,270	100	111,175,270	100	111,175,270	100	111,175,270			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	100	111,175,270	100	111,175,270	100	111,175,270	100	111,175,270	
				7.01.01.2.06.01	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	8	5,049,470	8	5,049,470	8	5,049,470	8	5,049,470			7.01.01.2.06.0001	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	8	5,049,470	8	5,049,470	8	5,049,470	8	5,049,470	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

				7.01.01.2 .06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengka n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	24	16,810,800	24	16,810,800	24	16,810,800	24	16,810,800				7.01.01.2 .06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengka n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	24	16,810,800	24	16,810,800	24	16,810,800	24	16,810,800	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	65,135,000	1	65,135,000	1	65,135,000	1	65,135,000				7.01.01.2 .06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	65,135,000	1	65,135,000	1	65,135,000	1	65,135,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .06.05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda n yang Disediakan	Paket	N/A	2	5,300,000	2	5,300,000	2	5,300,000	2	5,300,000				7.01.01.2 .06.0005	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda n yang Disediakan	Paket	N/A	2	5,300,000	2	5,300,000	2	5,300,000	2	5,300,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .06.06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokum en	N/A	1	2,220,000	1	2,220,000	1	2,220,000	1	2,220,000				7.01.01.2 .06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1	2,220,000	1	2,220,000	1	2,220,000	1	2,220,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .06.09	6. Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	N/A	4	16,660,000	4	16,660,000	4	16,660,000	4	16,660,000				7.01.01.2 .06.0009	6. Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	4	16,660,000	4	16,660,000	4	16,660,000	4	16,660,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	100	41,862,700	100	158,890,300	100	3,041,862,700	100	41,862,700				7.01.01.2 .07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	100	41,862,700	100	158,890,300	100	3,041,862,700	100	41,862,700	
				7.01.01.2 .07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	117,027,600	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000				7.01.01.2 .07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	117,027,600	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	3	41,862,700	4	41,862,700	5	41,862,700	5	41,862,700				7.01.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	3	41,862,700	4	41,862,700	5	41,862,700	5	41,862,700	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	87,520,000	100	87,520,000	100	87,520,000	100	87,520,000				7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	87,520,000	100	87,520,000	100	87,520,000	100	87,520,000	

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

				7.01.01.2.08.02	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	24	35,100,000	24	35,100,000	24	35,100,000	24	35,100,000				7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	36	35,100,000	36	35,100,000	36	35,100,000	36	35,100,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	25	52,420,000	25	52,420,000	25	52,420,000	25	52,420,000				7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	25	52,420,000	25	52,420,000	25	52,420,000	25	52,420,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	53,640,000	100	53,640,000	100	53,640,000	100	53,640,000				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	53,640,000	100	53,640,000	100	53,640,000	100	53,640,000		
				7.01.01.2.09.02	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	30,104,000	10	30,104,000	10	30,104,000	10	30,104,000				7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	30,104,000	10	30,104,000	10	30,104,000	10	30,104,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2	10,100,000	2	10,100,000	2	10,100,000	2	10,100,000				7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2	10,100,000	2	10,100,000	2	10,100,000	2	10,100,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	16	13,436,000	16	13,436,000	16	13,436,000	16	13,436,000				7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	16	13,436,000	16	13,436,000	16	13,436,000	16	13,436,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	85.3	6,975,800	85.4	6,975,800	85.5	6,975,800	85.5	6,975,800		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	85.3	6,975,800	85.4	6,975,800	85.5	6,975,800	85.5	6,975,800	
				7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	100	6,975,800	100	6,975,800	100	6,975,800	100	6,975,800				7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	100	6,975,800	100	6,975,800	100	6,975,800	100	6,975,800		

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

					7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	12	6,975,800	12	6,975,800	12	6,975,800	12	6,975,800					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	12	6,975,800	12	6,975,800	12	6,975,800	12	6,975,800	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
					7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	100	30,496,600	100	30,496,600	100	30,496,600	100	30,496,600					7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	100	30,496,600	100	30,496,600	100	30,496,600	100	30,496,600	
							Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N/A	100		100		100		100									Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N/A	100		100		100		100	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Laporan	N/A	5	30,496,600	5	30,496,600	5	30,496,600	5	30,496,600					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Laporan	N/A	5	30,496,600	5	30,496,600	5	30,496,600	5	30,496,600	
							Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Dokumen	N/A	4		4		4		4									Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Dokumen	N/A	4		4		4		4	
					7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	N/A	100	21,846,800	100	21,846,800	100	21,846,800	100	21,846,800					7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	N/A	100	21,846,800	100	21,846,800	100	21,846,800	100	21,846,800	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
					7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	4	8,649,800	4	8,649,800	4	8,649,800	4	8,649,800					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	4	8,649,800	4	8,649,800	4	8,649,800	4	8,649,800	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
					7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300					7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300	
					7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300						7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	100	12,951,300	100	12,951,300	100	12,951,300	100

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

				7.01.04.2 .02.01	Koordinasi/S Inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/S Inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Lapora n	N/A	12	12,951,300	12	12,951,300	12	12,951,300	12	12,951,300					7.01.04.2 .02.0001	Koordinasi/S Inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/S Inergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Laporan	N/A	12	12,951,300	12	12,951,300	12	12,951,300	12	12,951,300	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	100	21,527,400	100	21,527,400	100	21,527,400	100	21,527,400					7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	100	21,527,400	100	21,527,400	100	21,527,400	100	21,527,400	
				7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Desa	N/A	13	21,527,400	13	21,527,400	13	21,527,400	13	21,527,400					7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Desa	N/A	13	21,527,400	13	21,527,400	13	21,527,400	13	21,527,400	
				7.01.06.2 .01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	Dokum en	N/A	26	21,527,400	26	21,527,400	26	21,527,400	26	21,527,400					7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa	Dokumen	N/A	26	21,527,400	26	21,527,400	26	21,527,400	26	21,527,400	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.03	Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaa n Pembangun an dan Lembaga Pemberdaya an Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	31,904,700	100	31,904,700	100	31,904,700	100	31,904,700					7.01.03	Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaa n Pembangun an dan Lembaga Pemberdaya an Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	31,904,700	100	31,904,700	100	31,904,700	100	31,904,700	
				7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	Jumlah Lembaga/Ba dan Usaha dan Pemberdaya an Masyarakat Desa yang dibina	Lemba ga	N/A	26	31,904,700	26	31,904,700	26	31,904,700	26	31,904,700					7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	Jumlah Lembaga/Ba dan Usaha dan Pemberdaya an Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga	N/A	26	31,904,700	26	31,904,700	26	31,904,700	26	31,904,700	
						Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Desa	N/A	13		13		13		13								Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Desa	N/A	13		13		13		13		

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 - 2026

				7.01.03.2 .01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Desa	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang berpartisipa si dalam forum musyawara h perencanaa n pembangun an di Desa	Lemba ga Kemas yakata n	N/A	78	15,000,000	78	15,000,000	78	15,000,000	13	15,000,000						7.01.03.2 .01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Desa	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang berpartisipa si dalam forum musyawara h perencanaa n pembangun an di Desa	Lembaga Kemasya katan	N/A	78	15,000,000	78	15,000,000	78	15,000,000	13	15,000,000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.03.2 .01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lapora n	N/A	4	16,904,700	4	16,904,700	4	16,904,700	4	16,904,700						7.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	4	16,904,700	4	16,904,700	4	16,904,700	4	16,904,700	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, baik pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator hasil yang termuat dalam program-program yang akan dilaksanakan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bareng dengan pemerintah, dan Kecamatan Bareng akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Bareng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	72,12	72,5	73	73,5	73,5
2.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	6,57	6,72	6,75	6,80	6,80
4.	Nilai Paten Kecamatan Bareng	85,2	85,3	85,4	85,5	85,5
5.	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya	N/A	100%	100%	100%	100%

	yang dilaksanakan					
6.	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	N/A	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bareng Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen Pengganti RPJMD dan Renstra (2018-2023) yang telah berakhir sekaligus sebagai landasan pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja PD untuk tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat mewujudkan sinergitas kinerja Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Perubahan Renstra Kecamatan Bareng akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Bareng wajib berpedoman pada dokumen Renstra.

Dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Kecamatan Bareng, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.



Jombang, 27 Juni 2023

CAMAT BARENG

USMAN, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19710806 199803 1 007